

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang identik dengan sebutan negara agraris. Hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Indonesia ialah bertani. Masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian bertani juga tidak lepas dari pemeliharaan hewan ternak terutama sapi. Bagi para petani di desa-desa sapi dijadikan sebagai tabungan di kala masa paceklik tiba, Sapi-sapi peliharaan dapat dijual kembali saat dibutuhkan. Aktivitas beternak telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar produksi daging sapi di Indonesia hampir seluruhnya diperoleh dari peternakan rakyat.¹

Karakteristik dari peternakan rakyat biasanya merujuk kepada kepemilikan hewan ternak yang terbatas, ternak yang digunakan sebagai tabungan hidup, ternak yang dipelihara dibelakang rumah, lahan pemeliharaan ternak yang terbatas sehingga harus mencari pakan ke tempat yang jauh dari rumah, serta usaha ternak yang dilakukan secara turun-temurun.² Ciri diatas merupakan bentuk dari usaha yang diterapkan pada peternakan rakyat pada umumnya.

Dengan hanya peternakan rakyat saja, pemerintah merasa belum cukup untuk memenuhi angka konsumsi daging yang terus meningkat di masyarakat. Berdirinya Balai Pembibitan Hewan Ternak Umum menjadi upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu balai pembibitan tersebut berada di wilayah Sumatera Barat, dengan

¹Zakiah, dkk, "Gaya Kepemimpinan dan Perilaku Komunikasi GPPT dengan Kapasitas Kelambagaan Sekolah Peternakan Rakyat di Kabupaten Muara Enim", *Jurnal Penyuluhan*, Vol 13. No 2, 2017, hlm 133.

²*Ibid.*

nama Balai Pembibitan Ternak Umum Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas. Lokasi Balai Pembibitan Hewan Ternak Umum berada di Padang Mangateh yang terletak di Nagari Mungo *Afdeeling* Lima Puluh Kota. Balai pembibitan ini pertama kali dibuka sebagai area peternakan pada tahun 1918.³ Adanya balai ternak ini ikut mendorong berkembangnya jumlah ternak di Indonesia.

Keberadaan BPTU-HPT Padang Mengatas tersebut sampai saat ini mengalami sejarah yang panjang. Banyak perubahan yang terjadi sejak masa kolonial Hindia Belanda, yang pada saat itu balai ini lebih memprioritaskan dalam pengembangan pemeliharaan hewan kuda. Kuda menjadi prioritas pada zaman tersebut guna mengangkut beban waktu berperang, baik perang terhadap kerajaan yang ada di Indonesia maupun terhadap bangsa asing. Disamping itu, kuda juga diperlukan bagi bangsawan Belanda yang ada di Indonesia sebagai kuda tunggangan dan menarik kereta.⁴ Kuda juga menjadi ajang olahraga yang digemari oleh seluruh masyarakat, mulai dari petinggi Hindia Belanda hingga masyarakat lokal sendiri pada masa itu.

Dimulai pada tahun 1945-1950 pengelolaan peternakan Padang Mengatas tidak berjalan secara teknis dan hampir ditutup secara total yang disebabkan terjadinya revolusi kemerdekaan, yaitu revolusi fisik dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada zaman Orde Baru kegiatan peternakan mulai berkembang kembali dan terjadi peningkatan populasi ternak. Selain itu, peternakan menjadi salah satu pembibitan sapi potong yang terbesar di Indonesia.

³Nelfidawati, "Perkembangan Peternakan Padang Mengatas di Kanagarian Mungo Kab Lima Puluh Kota (1950-1994), *Skripsi*, (Padang: UNAND, 1998)". hlm. 31-32.

⁴Widya Novita, "Peternakan Padang Mangateh Di Kenagarian Mungo, Onderafdeeling Payakumbuh Afdeling Lima Puluh Kota 1918-1942", *Skripsi*, (Padang: UNP, 2007). hlm. 7

Namun pada era Reformasi, peternakan kembali hancur dan tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 BPTU-HPT Padang Mengatas harus dihadapkan dengan konflik perebutan tanah antara masyarakat Nagari Mungo dengan BPTU-HPT Padang Mengatas. Konflik bermula dari ninik mamak Nagari Mungo yang merasa bahwa tanah yang dipakai oleh BPTU-HPT Padang Mengatas adalah tanah milik ulayat Nagari Mungo seluas 160 Ha dari total 280 Ha.⁵ Penggunaan sebagian tanah ulayat Nagari Mungo tersebut oleh BPTU-HPT Padang Mengatas kemudian menimbulkan sengketa dengan masyarakat yang dikenal dengan “sengketa Mungo”. Fungsi tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau dipandang dari aspek sosial ekonomi adalah untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin.⁶ Sengketa ini terjadi terutama sejak lahirnya sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1997,⁷ Kecamatan Luak atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia atas lahan tersebut.

Lahirnya sertifikat tanah tersebut menyebabkan kemarahan masyarakat Nagari Mungo karena merasa tanah ulayat nagari mereka berpindah hak kepemilikannya kepada Departemen Pertanian. Berdasarkan sejarahnya, tanah tersebut awalnya disewakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918, namun setelah kemerdekaan Indonesia tanah yang disewakan kepada pemerintah Belanda waktu itu tidak dikembalikan kepada nagari, tetapi tetap digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk kegiatan peternakan.

⁵Wirda Ningsih. “Konflik Pemilikan Tanah di Sekitar Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Padang Mengatas Kabupaten 50 Kota (1995-2002)”. *Skripsi*, (Padang: UNP. 2004). hlm 38.

⁶Alidinar Nurdin, “Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Agribisnis Peternakan*, Vol. 2, No. 3, Desember 2006, hlm. 86.

⁷Wirda Ningsih, *Op.cit.* hlm. 33.

Pada dasarnya tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat.⁸

Menyikapi permasalahan tersebut masyarakat Mungo langsung melakukan pemboikotan lahan yang digunakan BPTU-HPT Padang Mengatas pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Tahun 2000 menjadi puncak konflik tanah ulayat antara masyarakat dengan pihak balai. Pemboikotan berubah menjadi anarkis hingga terjadi pengrusakan-pengrusakan terhadap fasilitas BPTU-HPT Padang Mengatas dan beberapa fasilitas umum di sekitaran balai tersebut.

Banyaknya fasilitas-fasilitas BPTU-HPT Padang Mengatas yang mengalami kerusakan membuat pihak aparatur polisi turun tangan dalam menindaklanjuti konflik tersebut. Dalam upaya mengurangi meluasnya konflik tanah ulayat ini harus diserahkan kepada pengadilan. Terdapat 19 orang tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai menjadi provokator ditangkap. Walaupun demikian sengketa masih terus berlangsung hingga tahun 2009.⁹

Sejak tahun 2000 hingga akhir tahun 2010, peternakan Padang Mengatas tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut kawasan peternakan menjadi tidak aman disebabkan karena ancaman dan teror yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Mungo. Pegawai BPTU-HPT Padang Mengatas banyak yang meninggalkan peternakan karena takut dengan ancaman dan teror tersebut. Selain itu, ternak banyak yang mati akibat lahan

⁸Subhan Zein, "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm. 121.

⁹Syafri, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Mungo Kabuptaen Lima Puluh Kota*, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Kartini Surabaya), 2010, hlm. 62.

pengembalaan ternak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tersebut. Akhirnya pada tahun 2011 Konflik tanah telah selesai secara hukum, sehingga BPTU-HPT Padang Mengatas kembali membangun dan membenahi peternakan serta mengembalikan fungsinya sebagai pusat pembibitan sapi Nasional.

Selain itu BPTU-HPT Padang Mengatas ini juga menjadi tempat wisata yang terkenal di Sumatera Barat karena pemandangannya yang indah, sehingga dijuluki sebagai New Zealand-nya Sumatera. Dikutip dari sumbarprov.go.id, Jokowi mengungkapkan bahwa Balai pembibitan Ternak Unggul ini memiliki 1250 ekor sapi, dengan tiga jenis, yakni simental, limosin, belgian bull dan sapi pesisir (sapi lokal). "Ini adalah sebuah contoh yang ke depan akan kita contoh dan di terapkan, setiap daerah kalau mempunyai kurang lebih 280 Ha ditanami rumput yang bisa dipakai untuk pakan sapi itu, dan tidak dikandangkan," katanya. Sapi-sapi tersebut dibiarkan hidup bebas berkembang biak, mencari makan, dan tumbuh besar layaknya ladang peternakan sapi di New Zealand. Sehingga tak berlebihan kiranya tempat ini disebut sebagai New Zealand-nya Indonesia.¹⁰

Keberhasilan BPTU-HPT Padang Mengatas selain menyediakan bibit ternak juga memberi kesempatan kerja dan kesempatan wiraswasta terutama bagi masyarakat Nagari Mungo yang berada di sekitar area Balai Pembibitan tersebut. Selain itu berdirinya BPTU-HPT Padang Mengatas memberi suasana baru kepada kelompok tani yang ada di Nagari Mungo, salah satunya yaitu adanya kelompok tani "Luak Lalang" yang menjadi peringkat 1 nasional pada tahun 1997.

Fenomena diatas menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang perkembangan peternakan BPTU-HPT Padang Mengatas tahun 2009-

¹⁰Jojon, "Presiden Kagum Lihat Sapi Lokal Padang Mengatas" <https://sumbarprov.go.id/home/news/5842-presiden-kagum-lihat-sapi-lokal-padang-mengatas> (Diakses pada 28 Maret 2022, Pukul 14.57).

2019 setelah konflik tanah selesai secara hukum. Hal yang ingin penulis kaji disini yaitu tentang perkembangan pembangunan kawasan balai peternakan dan pengelolaannya, serta bagaimana pengaruh BPTU-HPT Padang Mengatas sendiri terhadap masyarakat Nagari Mungo setelah adanya konflik tanah ulayat dulunya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti BPTU-HPT Padang Mengatas dengan topik **“PERKEMBANGAN BPTU-HPT PADANG MENGATAS DI KANAGARIAN MUNGO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2009-2019”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian Perkembangan BPTU-HPT Padang Mengatas di Kanagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2009-2019. Adapun batasan temporal dari penulisan ini, penulis memberi batasan mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Tahun 2009 sebagai awal BPTU-HPT Padang Mengatas mulai beroperasi secara optimal setelah berakhirnya konflik antara pihak BPTU-HPT Padang Mengatas dengan masyarakat Nagari Mungo perihal tanah ulayat yang digunakan oleh BPTU-HPT sebagai lahan pembibitan ternak sapi. Konflik tersebut dimulai tahun 1998 hingga 2009 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian BPTU-HPT Padang Mengatas. Tahun 2019 dijadikan sebagai batasan akhir setelah BPTU-HPT Padang Mengatas mengalami perkembangan 10 tahun (1 Periode) setelah terjadinya konflik tanah ulayat antara masyarakat Nagari Mungo dan BPTU-HPT Padang Mengatas.

Melihat dari pemaparan di atas tentang bagaimana latar belakang BPTU Padang Mengatas tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses berkembangnya BPTU-HPT Padang Mengatas menjadi salah

satu balai ternak terbesar di Sumatera. Walaupun BPTU-HPT Padang Mengatas diharuskan menghadapi gempuran konflik, balai ternak tersebut berhasil bertahan dan berkembang hingga kancah nasional. Guna lebih fokusnya permasalahan yang akan dikaji, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dari BPTU-HPT Padang Mengatas sebelum tahun 2009?
2. Bagaimana perkembangan dari BPTU-HPT Padang Mengatas selama 1 periode dari tahun 2009-2019?
3. Bagaimana pengaruh BPTU-HPT Padang Mengatas terhadap masyarakat Nagari Mungo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantara lain:

1. Membahas mengenai kondisi BPTU-HPT Padang Mengatas sebelum tahun 2009.
2. Mengkaji mengenai kondisi perekonomian BPTU-HPT Padang Mengatas selama 1 periode dari tahun 2009-2019
3. Menganalisis pengaruh seperti apa yang diberikan oleh BPTU-HPT Padang Mengatas kepada masyarakat sekitar terutama Nagari Mungo.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan perekonomian BPTU-HPT Padang Mengatas selama 1 periode 10 tahun pasca terjadinya konflik tahun 1998-2009 di Nagari Mungo, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini juga memberi pengetahuan pembaca bagaimana kiat-kiat yang dilakukan lembaga BPTU Padang Mengatas untuk berkembang lebih maju setelah terjadinya konflik pada tahun 1998-2009.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini sebagai literatur yang dapat membantu dan menjadi bahan pembandingan bahwasannya penelitian ini memiliki sifat kebaruan dan terdapat perbedaan dengan penelitian lainnya serta mendapat data-data yang mampu memperkuat data-data penelitian ini nantinya.

Dalam tinjauan pustaka, ada beberapa referensi yang menjadi studi relevansi salah satunya yang menjadi acuan awal dari terciptanya tulisan ini berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Nelfidawati dengan judul “Perkembangan Peternakan Padang Mengatas di Kanagarian Mungo Kab Lima Puluh Kota (1950-1994)”.¹¹ Penulisan ini menjelaskan bagaimana perkembangan yang dialami oleh BPTU-HPT Padang Mengatas setelah Indonesia merdeka. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana kondisi lembaga peternakan yang sempat mengalami kehancuran pada tahun 1958 hingga berhasil melewati masa krisis melalui bantuan dana dari pemerintah Indonesia dan dana kerjasama dari pemerintah Jerman pada tahun 1973 dengan syarat hanya memperbolehkan mengembangbiakkan hewan ternak jenis sapi saja. Hal ini disebabkan pada masa itu fungsi kuda telah digantikan oleh transportasi mesin uap yang lebih maju peradabannya.

Studi ini merupakan pembaharuan dari studi yang ditulis oleh Nelfidawati sebelumnya. Studi ini lebih memfokuskan kepada perkembangan BPTU-HPT

¹¹Nelfidawati, *Loc.cit.*

Padang Mengatas dari tahun 2009-2019 yang didalamnya berisi data-data terbaru mengenai BPTU-HPT Padang Mengatas.

Skripsi Widya Novita yang berjudul “Pernakan *Padang Mangateh* di Kanagarian Mungo *Onderafdeeling* Payakumbuh, *Afdeling* Lima Puluh Kota 1918-1942.¹² Pembahasan yang terdapat di dalam skripsi menjelaskan bagaimana berdirinya stasiun ternak *Padang Mangateh* pertama kali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam skripsinya, Widya Novita menerangkan perkembangan-perkembangan yang dialami oleh stasiun ternak *Padang Mangateh*. Adanya stasiun ternak *Padang Mangateh* juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota dalam sarana transportasi seperti Bendi. Pembahasan ini membantu pemahaman dalam perkembangan BPTU Padang Mengatas.

Skripsi yang ditulis Wirda Ningsih dengan judul “ Konflik Pemilikan Tanah di Sekitar Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Padang Mengatas Kabupaten 50 Kota Tahun 1995-2002,¹³ menjelaskan mengenai konflik tanah yang dialami BPTU-HPT Padang Mengatas. Pembahasan mengenai konflik yang terdapat di dalam skripsi ini menjadi titik awal dari perkembangan BPTU-HPT Padang Mengatas.

Skripsi yang ditulis oleh Syafri, dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota”,¹⁴ membahas mengenai bagaimana terjadinya kasus konflik tanah ulayat di Nagari Mungo bisa terjadi dan bahkan membahas bagaimana terselesaikannya kasus konflik tanah

¹²Widya Novita, *Loc.cit.*

¹³Wirda Ningsih, *Loc.cit.*

¹⁴Syafri, *Loc.cit.*

ulayat yang terjadi 10 tahun tersebut. Skripsi ini membantu penulis memahami bagaimana proses konflik tersebut berlangsung.

Artikel yang ditulis Alidinar Nurdin yang berjudul “Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat” dalam Jurnal Agribisnis Peternakan,¹⁵ membahas mengenai konflik tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Nagari Mungo dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas berawal dari keinginan BPTU Padang Mangatas untuk mensertifikatkan tanah lokasi BPTU menjadi HGU. Namun ninik mamak Nagari Mungo tidak menyetujuinya karena menurut mereka tanah Padang Mangatas yang sekarang dipakai oleh BPTU itu adalah tanah ulayat mereka dan tidak boleh disertifikatkan. Peristiwa konflik yang terjadi antara BPTU dan masyarakat Nagari Mungo menjadi salah satu dasar penelitian ini dilakukan.

E. Kerangka Analisis

Tulisan ini diberi judul **“PERKEMBANGAN BPTU-HPT PADANG MENGATAS DI KANAGARIAN MUNGO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN 2009-2019”**. Penulisan ini termasuk ke dalam kajian sejarah sosial ekonomi. Menurut Kuntowijoyo, sejarah sosial mempunyai garapan yang sangat luas dan beragam. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi sejarah sosial ekonomi.¹⁶

Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang mencoba untuk melihat bukti-bukti sejarah dari sudut pandang mengembangkan

¹⁵Alidinar Nurdin, *Loc.cit.*

¹⁶Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana), 1994, hlm. 33.

arah sosial. Sedangkan sejarah ekonomi secara garis besar mempunyai pengertian sebagai kegiatan dan keadaan perekonomian suatu masyarakat pada masa lampau. Secara singkat sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi. Sehingga sejarah sosial dan sejarah ekonomi menjadi semacam dua pembelajaran sejarah yang disatukan menjadi sejarah sosial ekonomi.¹⁷

Penelitian ini digolongkan dalam sejarah ekonomi karena dalam sejarah ekonomi mempelajari faktor-faktor yang menentukan jalannya perkembangan ekonomi yang akan mempunyai sumbangan sewajarnya pada penetapan kebijakan perencanaan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.¹⁸ Kajian ekonomi dalam penulisan ini berfokus pada perkembangan lembaga pemeliharaan dan pembibitan hewan ternak BPTU-HPT Padang Mengatas di Nagari Mungo, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peternakan menurut KBBI, ialah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak.¹⁹ Pada intinya peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, secara garis besar yang didalamnya termasuk 1) Pertanian rakyat. 2) Perkebunan (perkebunan besar, perkebunan rakyat). 3) Kehutanan. 4) Peternakan. 5) Perikanan (perikanan darat dan perikanan laut). Awalnya, peternakan adalah bagian dari kehidupan petani swasembada, dengan tujuan bukan hanya sumber makanan untuk keluarga petani tetapi juga sumber pupuk, pakaian, sarana transportasi, tenaga untuk dimanfaatkan, serta bahan bakar. Awalnya, hewan

¹⁷Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 14-24.

¹⁸Kuntowijoyo, Op.Cit, hlm. 80.

¹⁹KBBI, <https://kbbi.web.id/ternak>, Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 15.30.

dimanfaatkan sebisa mungkin selagi hidup untuk menghasilkan telur, susu, wol, bahkan darah, dan memakan hewan itu sendiri bukanlah tujuan utama.²⁰ Di sisi lain, hewan juga sering ditenakkan secara intensif terutama di negara-negara maju yang menerapkan peternakan pabrik.

Komoditas peternakan berpotensi menjadi produk unggulan di seluruh dunia, karena daya adaptasi hidup ternak yang luas. Ruminansia (kerbau, sapi, kambing, domba) merupakan penghasil bahan makanan bergizi tinggi dan hampir semua negara mampu menjadi penghasil ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri maupun ekspor.²¹ Salah satu dari peternakan terbesar di Indonesia berada di Nagari Mungo, Kab. Lima Puluh Kota yaitu BPTU-HPT Padang Mengatas. Padang Mengatas dapat dikategorikan kepada peternakan besar yang berbentuk perusahaan.

BPTU-HPT Padang Mengatas merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang dikhususkan untuk memproduksi bibit sapi potong jenis simental dan limosin di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional. Prioritas kinerja BPTU-HPT Padang Mengatas adalah peningkatan produksi bibit unggul ternak sapi potong yang berkualitas sesuai dengan mottonya “excellent breed is our priority”.

²⁰John Webster, *Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture*, (New York: Routledge, 2013), hlm. 4–10.

²¹Hamdi Mayulu dan Taufan Purwokusumaning Daru, Kebijakan Pengembangan Peternakan Berbasis Kawasan: Studi Kasus di Kalimantan Timur, *Journal of Tropical AgriFood* Vol 1. No.2. 2019, hlm. 50.

Sebagai suatu peternakan besar yang berbasis perusahaan maka BPTU-HPT Padang Mengatas juga memiliki kategori yang ditetapkan sebagai usaha peternakan. BPTU-HPT Padang Mengatas terletak di selatan atau 15 km dari kota Payakumbuh, lebih tepatnya berada di Nagari Mungo Kab. Lima Puluh Kota dengan letak geografis alamnya berada di lereng gunung Sago dimana sebelah kiri dan kanannya dibatasi jurang dalam dan berbatu-batu. Walaupun demikian untuk akses menuju lokasi peternakan tidaklah sulit, jalan menuju peternakan cukup baik dan beraspal. Sejalan dengan fungsi peternakan BPTU-HPT Padang Mengatas sebagai tempat penyediaan bibit ternak dan pakan hijauan ternak yang sudah banyak dijual dan disebar ke berbagai daerah di Indonesia.²²

F. Metode Penelitian Dan Bahan Sumber

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil penelitian. Tahapan yang pertama yaitu Heuristik, yang merupakan mengumpulkan sumber dan juga sebagai langkah awal yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan sumber- sumber dalam penelitian ini ada beberapa cara yaitunya Studi lapangan dan Studi Pustaka. Dalam melakukan studi lapangan, sumber-sumber ini bisa didapatkan dari pihak pengelola BPTU Padang Mengatas, Pemerintahan Nagari Mungo, Pemerintahan Kecamatan Nagari Bukit Sikumpa, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota. Informasi diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang bisa didapatkan berupa arsip atau dokumen seperti surat keputusan Gubernur, surat keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Surat Keputusan BPN Kabupaten Lima Puluh Kota, surat keputusan

²²Nelfidawati, *Op.Cit*, hlm. 10.

Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota, surat Kerapatan Adat Nagari (KAN), laporan umum Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Laporan Pertanggungjawaban pengurus BPTU Padang Mengatas.

Tahapan kedua yaitu kritik sumber. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.²³ Kritik sumber digunakan untuk mengetahui data-data yang didapatkan di lapangan. Dalam tahapan ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap data-data dari sumber-sumber yang didapatkan dalam studi lapangan serta memilah data dari sumber-sumber yang didapatkan seperti wawancara, dan arsip-arsip yang terkumpul.

Untuk sumber tertulis, kritik ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk melihat kredibilitas sumber yang didapat. Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk melihat keabsahan dan keotentikan atau keaslian sumber. Kritik ekstern dapat dilakukan dengan meneliti kertas, tinta, gaya tulisan, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan semua penampilan luarnya.²⁴

Tahapan ketiga yaitu Interpretasi, yaitu penafsiran yang dilakukan kepada sumber-sumber yang telah didapatkan. Pada tahap ini dapat dilakukan penafsiran atau analisa dan dihubungkan antara fakta-fakta yang telah didapatkan, sehingga menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang terjadi. Setelah ketiga tahap dilalui,

²³Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2007), hlm,104.

²⁴Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1995), hlm.99.

maka tibalah saatnya untuk menuliskan kembali kejadian dari awal sampai akhir secara sistematis sehingga menghasilkan suatu penulisan sesuai dengan sumber yang telah didapat, dikritik serta diinterpretasikan, sehingga tahap inilah yang disebut dengan historiografi.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mengantarkan pembaca kepada topik permasalahan yang akan dibahas dan mengapa pembahasan ini menarik untuk dibahas, rumusan dan batasan masalah yang akan memfokuskan masalah ke dalam batasan-batasan spasial dan juga temporal dalam pembahasan nantinya, tujuan dan manfaat penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan maksud pembahasan mengenai tema ini dibuat, tinjauan pustaka yang menjabarkan bahwasanya penulisan ini didasari menggunakan literatur-literatur yang bersangkutan guna membuktikan keorisinilan tulisan ini, kerangka analisis untuk menjelaskan penggunaan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini, metode penelitian dan bahan sumber yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian tema sejarah sosial ini, serta sistematika penulisan yang menjelaskan isi masing-masing pembahasan di dalam bab.

Bab II membahas mengenai keadaan geografis, penduduk serta sejarah singkat BPTU-HPT Padang Mengatas dan konflik tanah ulayat antara pihak BPTU-HPT Padang Mengatas dan masyarakat Nagari Mungo.

Bab III membahas tentang perkembangan BPTU-HPT Padang Mengatas terutama mengenai sarana prasarana, hewan ternak serta pembibitan dan strategi pemasaran.

Bab IV membahas mengenai capaian kinerja BPTU-HPT Padang Mengatas dan pengaruh BPTU-HPT Padang Mengatas terhadap peningkatan kualitas hewan ternak dan sumber daya manusia di Nagari Mungo.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh bab yang ada dalam penelitian ini.

